

Peran Gender Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

The Role of Gender in Poverty Reduction Through Productive Assistance Policies Micro Enterprises (BPUM)

¹Nanda Herijal Putra, ²Amran

¹Institut Agama Islam Negeri Langsa

²SDM PKH Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur

Email: nandaherijalputra@iainlangsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang peran gender dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana peran gender dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur melalui Bantuan BPUM, proses pemberdayaan perempuan di Kabupaten Aceh Timur dilakukan melalui Bantuan BPUM dan dampak pemberian Bantuan BPUM terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan hasil kajian didapatkan bahwa usaha ekonomi menengah memiliki peranan penting dalam rangka mengatasi kemiskinan akibat pandemic covid-19. Sektor Usaha ekonomi menengah mampu memberikan kontribusi dalam usaha mendorong pertumbuhan ekonomi selama pandemic covid-19. Peran perempuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan Bantuan Produktif Usaha mikro (BPUM) sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid-19. Budaya partiarkhi yang mendorong ketidaksetaraan gender telah mencegah perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor formal, mendorong perempuan untuk mencari pekerjaan di sektor informal. Upaya pengembangan lapangan kerja perempuan di sektor informal dilakukan dengan memanfaatkan bantuan BPUM sebagai modal usaha ekonomi keluarga. Upaya pengentasan kemiskinan melalui BPUM diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan semakin meningkatnya ketimpangan gender di masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan BPUM sebagai landasan dalam rangka pengembangan industri rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, perempuan melakukan upaya ekonomi keluarga yang dapat menyerap tenaga kerja, baik dari keluarganya sendiri maupun dari tenaga kerja di sekitar rumah.

Kata Kunci: Peran Gender, Penanggulangan Kemiskinan, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Abstract

This study examines the role of gender in efforts to reduce poverty through the Micro Business Productive Assistance (BPUM) policy. Data collection is carried out through observation, wawancara and documentation. The problem studied is how gender roles in poverty reduction efforts in East Aceh Regency through BPUM Assistance, the process of empowering women in East Aceh Regency is carried out through BPUM Assistance and the impact of providing BPUM Assistance on poverty reduction in East Aceh Regency. Based on the results of the study, it was found that medium-sized economic businesses have an important role in overcoming poverty due to the Covid-19 pandemic. The medium-sized economic business sector is able to contribute to efforts to encourage economic growth during the Covid-19 pandemic. The role of women in efforts to alleviate poverty through the BPUM policy is one of the strategies carried out by the East Aceh Regency Government in the context of community economic growth during the Covid-19 pandemic. Partiarkhi culture that fosters gender inequality has prevented women from participating in the formal sector, prompting women to find work in the informal sector. The efforts to develop women's employment in the informal sector are carried out by utilizing BPUM assistance as family economic business capital. Efforts to alleviate poverty through BPUM are balanced with public awareness of the growing gender inequality in society. Poverty reduction policy through BPUM policy as a foundation in the context of home industry development to improve family welfare through women's empowerment. In this case, women do family economic efforts that can absorb labor, both from their own families and from the labor around the house.

Keywords: Gender Role, Poverty Reduction, Micro Enterprise Productive Assistance (BPUM)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. Jika pendapatan anggota masyarakat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dasar keluarga mereka akan makanan, pakaian, dan perumahan/tempat tinggal, mereka dianggap berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga berdampak terhadap berkurangnya kemampuan keluarga untuk memenuhi standar hidup di bidang kesehatan masyarakat dan standar hidup di bidang pendidikan.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini berdampak terhadap sektor perekonomian masyarakat yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah angka kemiskinan. Khususnya untuk rumah tangga ekonomi kelas bawah, situasi ini mempersulit untuk mencapai tuntutan dasar mereka. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia ialah pemutusan penyebaran mata rantai pandemi Covid-19 berupa penerapan pembatasan sosial. Kebijakan tersebut mengakibatkan perekonomian masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik, memaksa beberapa usaha untuk ditutup dan beberapa pekerja harus dirumahkan.

Realitas tersebut menyebabkan masyarakat mengalami penurunan pendapatan, sebagian dari mereka kehilangan mata pencarhianya sehingga berpotensi terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Adapun dampak negatif Pandemi Covid-19 berupa terjadinya penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan rumah tangga. Penurunan pendapatan tersebut terjadi sebagai akibat *lock down*, hambatan waktu untuk kerja, penurunan upah karyawan serta penurunan hasil produktivitas kerja. Dalam menghadapi realitas tersebut, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian bantuan modal usaha melalui Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada masyarakat miskin dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (Hastuti, 2014).

Perempuan merupakan sumber daya manusia yang tidak seharusnya dibedakan ualitasnya dengan laki-laki, namun dalam kehidupan sehari-hati konstruksi sosial membuat perempuan tertinggal. Perempuan sekarang memiliki hak dan peluang yang sama seperti laki-laki untuk dapat berpartisipasi diberbagai bidang kehidupan, termasuk dunia kerja, sebagai akibat dari perubahan keadaan dan era globalisasi. Akibat pandemi Covid-19 saat ini, perempuan memiliki potensi dan peran yang sangat besar sebagai pelaku usaha ekonomi mikro. Dengan memanfaatkan akses teknologi digital dan berbagai media sosial, mereka berpotensi mendominasi pasar untuk pemulihan ekonomi dan bertindak sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam kehidupan sehari-hari, peran ganda wanita tidaklah asing didengar, saat ini wanita selain berperan sebagai istri atau ibu rumah tangga namun wanita juga aktif dalam diberbagai bidang seperti politik, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu fungsi ganda perempuan menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik sebagai istri, tetapi juga berperan di ruang publik dengan bekerja. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan adalah untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga (Samsidar, 2019).

Dengan demikian, antara perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Perempuan ikut serta bekerja dikarenakan kebutuhan keluarga tidak akan terpenuhi jika mengandalkan penghasilan suami saja, realitas tersebut mendorong istri untuk bekerja sehingga memiliki penghasilan untuk membantu mencukupi dan memenuhi

kebutuhan keluarga. Akibatnya, baik pria maupun wanita dapat mencapai kesempatan dan peran yang sama untuk mengembangkan potensi diri dalam di sektor kehidupan.

Program BPUM merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan saat Covid-19 terutama para perempuan. Melalui bantuan BPUM, para perempuan mendapatkan modal untuk membuka sekaligus menjalankan usaha ekonomi keluarga atau lebih dikenal dengan istilah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait erat dengan keterlibatan perempuan dalam bisnis. Realitas tersebut mendorong para perempuan untuk berperan ganda dengan melakukan berbagai jenis usaha yang dapat menghasilkan uang sehingga dapat membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga.

Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan (*empowerment*) bagi para perempuan. Pemberdayaan sebagai salah satu tujuan pembangunan yang dilakukan dalam paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia seutuhnya. Konsep pemberdayaan sudah mulai dilakukan dari tahun 1970-an, gagasan pemberdayaan telah diperaktikkan, dan terus tumbuh dan berkembang selama tahun 1980-an. Intinya, pemberdayaan adalah pencarian solusi baru untuk melakukan pembangunan yang adil serta merata bagi masyarakat Indonesia. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas diri perempuan agar ikut berpartisipasi dalam memiliki kekuasaan, pengawasan, pembuatan keputusan dan transformasi sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (Hasanah, 2013).

Terkait dengan realitas tersebut, pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Timur melalui Bantuan BPUM di masa pandemi Covid-19 diprioritaskan pada meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan melalui pengembangan usaha rumahan dan usaha nirlaba sebagai bagian dari langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada peran gender sebagai subjek pembangunan merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya melakukan pemberdayaan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Timur. Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisis peran gender dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur melalui Bantuan BPUM, proses pemberdayaan perempuan di

Kabupaten Aceh Timur dilakukan melalui Bantuan BPUM serta dampak pemberian Bantuan BPUM terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.

METODE

Peneliti menggunakan metodologi deskriptif dan teknik penelitian kualitatif. Proses penelitian yang dikenal sebagai penelitian kualitatif adalah proses yang mengkaji fenomena sosial dan masalah manusia (Arkandito et al., 2016). Adapun alasan pemilihan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah untuk melakukan pemecahan masalah yang diselidiki secara mendalam terhadap obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Model interaktif *Miles, Huberman, and Saldana* adalah salah satu yang digunakan peneliti untuk analisis data. Analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Wanto, 2017).

PEMBAHASAN

Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan serta tidak memiliki lapangan pekerjaan membuat perempuan rela bermigrasi ke kota-kota untuk mencari pekerjaan karena kemiskinan, sedangkan yang lainnya mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri. Dalam rangka menyikapi kenyataan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mendukung dan memberikan bantuan BPUM bagi perempuan, dan salah satu dari tujuh prioritas utama pembangunan lima tahun ke depan adalah meningkatkan kemampuan beradaptasi ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas (RPJMN 2020-2024).

Dalam hal ini, untuk memperkuat kapasitas perempuan di Indonesia dalam berwirausaha, Kementerian PPPA menciptakan sinergi dengan organisasi yang mengelola wirausaha perempuan. hal itu dilakukan untuk melibatkan perempuan dalam dunia pekerjaan. Dalam upaya mencegah terjadinya ketidak adilan gender dalam bidang ekonomi antara laki-laki dan perempuan, Sementara perempuan masih memiliki hak dan kewajiban sebagai pengurus rumah tangga, mereka mengendalikan industri rumah tangga secara mayoritas. Bekerja dari rumah, terutama di kalangan

perempuan, dapat membantu menurunkan pengangguran secara tidak langsung. dengan meningkatnya pendapatan dari industri rumahan, sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik bawaan yang dikenal sebagai gender yang terbentuk secara sosial dan budaya sehingga laki-laki dianggap maskulin dan perempuan sebagai feminine (Yuwono, 2013).

Dalam sistem patriarki, perempuan diposisikan sebagai istri yang bertugas mendampingi suami dan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga disepanjang hari hingga menjelang malam. Realitas tersebut sesuai dengan penyataan perempuan tidak mendapatkan kebebasan untuk ikut serta melakukan pekerjaan di sektor public sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Dengan demikian ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari sebagai hambatan struktural yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tidak memiliki akses yang sama (Sakina & A., 2017).

Bantuan BPUM digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur untuk usaha ekonomi menengah yang digunakan untuk mengembangkan usaha industri rumahan, terutama dilakukan oleh perempuan. Rencana strategis dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), berfokus pada gender di sektor ekonomi, sangatlah relevan dengan pemberdayaan perempuan di sektor industry rumahan. Potensi perempuan sebagai pelaku usaha ekonomi menengah memiliki peranan penting dalam meningkatkan ekonomi keluarga pada sektor usaha mikro. Strategi pembangunan yang dibangun di atas *peoplehood* yang disebut pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengangkat martabat mereka yang terjebak dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. (Noor, 2011).

Umunyan usaha ekonomi menengah digeluti oleh kaum perempuan, namun demikian potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dalam peningkatan ekonomi melalui pemberian bantuan BPUM sebagai wujud Kesetaraan Gender di bidang ekonomi. Pemberdayaan terhadap perempuan dilakukan untuk memberikan daya atau kekuatan kepada perempuan sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan hidup mandiri tanpa harus bergantung kepada laki-laki.Jusmita and Aldri Frinaldi, “Menjadi Virgin Coconut Oil di Nagari Sunur, Kecamatan” 5 (2021): 102. Dengan demikian

perempuan diberikan kesempatan yang sama di bidang ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh para lelaki pada umumnya.

Adapun strategi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha perempuan antara lain mempelajari teknologi, mempromosikan dan memasarkan produk secara online menggunakan media sosial, memperkuat jaringan, dan berinovasi tidak hanya dengan menciptakan produk baru tetapi juga dengan membangun jaringan yang kuat, memiliki literasi keuangan yang kuat, dan memiliki akses modal usaha dengan bergabung bersama koperasi. Meskipun usaha ekonomi mikro yang dilakukan oleh perempuan tidak mampu meningkatkan standar hidup namun usaha ekonomi mikro mampu meningkatkan keuntungan. Adapun sasaran dari program pemberdayaan ekonomi adalah wanita yang sudah aktif berwirausaha (Pieters & Klasen, 2020).

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas diri perempuan sehingga dapat ikut berpartisipasi di semua lini pembangunan terutama dalam membangun industri rumah tangga. Industri rumah tangga adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menjadi barang setengah jadi, atau mengubah bahan baku menjadi barang yang bernilai lebih tinggi dengan maksud untuk dipasarkan (Joesyiana, 2017).

Industri rumahan berupa usaha ekonomi menengah yang dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Aceh Timur ada banyak peluang untuk meningkatkan ketahanan keluarga dalam hal ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan hubungan antar anggota keluarga. Selain itu juga usaha ekonomi menengah mendorong kemandirian perempuan di bidang ekonomi sehingga berdampak pada pengambilan keputusan. Usaha ekonomi menengah dilakukan dengan cara menghasilkan pekerjaan baru, menyerap sejumlah besar tenaga kerja untuk bekerja dari rumah, memberi tetangga kesempatan untuk bekerja di sekitar rumah sebagai pekerja paruh waktu, atau menghentikan migrasi penduduk produktif untuk menjadi pekerja di kota dan luar negeri, usaha ekonomi menengah menggunakan dan memproduksi produk lokal dalam bentuk barang jadi.

Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pertumbuhan Industri Rumah Tangga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan mengatur pengembangan usaha rumahan. Tujuan dari

Pedoman Umum Pengembangan Industri Rumah Tangga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan, menurut Pasal 2, adalah untuk melaksanakan pengembangan industri rumah tangga yang terkoordinasi, efektif, dan efisien sehingga industri tersebut bertransformasi menjadi usaha kecil dan dapat menjadi sumber pendapatan serta membantu keluarga hidup lebih nyaman dan berkelanjutan.

Usaha ekonomi menengah memiliki peranan sangat penting dalam rangka memberantas kemiskinan yang disebabkan pandemic covid-19. Sektor Usaha ekonomi menengah mampu mendukung inisiatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama pandemic covid-19. Sektor usaha kecil diposisikan secara strategis untuk memiliki keunggulan dibandingkan usaha besar atau menengah. Manfaatnya termasuk kemampuan menyerap tenaga kerja, memanfaatkan sumber daya regional, dan cukup fleksibel.

Peran perempuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan Bantuan Produktif Usaha mikro (BPUM) sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa pandemic covid-19. Upaya BPUM untuk mengurangi kemiskinan mencapai keseimbangan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketimpangan gender yang telah berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan selalu memposisikan para perempuan di depan.

Perempuan memiliki peranan dan posisi penting dalam mengatur perekonomian keluarga. Pekerjaan yang dilakukan perempuan dalam segala aspek pemeliharaan rumah tangga, termasuk melayani suami, merawat anak, memasak, menyuci pakaian, serta membersihkan rumah, produktif dan berkelanjutan, yang secara tidak langsung meningkatkan pendapatan keluarga. Hal tersebut dikarenakan seluruh pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh perempuan (istri) tanpa harus mengeluarkan uang sebagai imbalan atau upah (Aswiyati, 2016).

Pada dasarnya, perempuan memainkan empat fungsi dalam keluarga miskin: mereka mengendalikan keuangan keluarga, bertanggung jawab atas semua tugas rumah tangga, mereka adalah penyedia pendapatan utama keluarga, dan mereka adalah salah satu simpul kunci dalam jejaring sosial dalam hal transfer sosial, terutama selama masa-masa sulit dan krisis. Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan sebagai komponen penting dari pembangunan yang tidak dapat diabaikan karena kemajuan ekonomi yang sukses tidak semua otomatis dapat meminimkan angka kemiskinan, namun Sejak tahun 1997, UMKM telah menjadi pilihan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan sebagai mekanisme penyelamatan dalam proses pemulihan ekonomi bangsa. Dengan demikian, UMKM mendukung pertumbuhan ekonomi dalam konteks lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan melalui UMKM berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, maka dilakukan upaya untuk memajukan dan memperluas sektor UMKM untuk penyerapan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka pengangguran. Hasilnya, penanggulangan kemiskinan melalui UMKM memiliki potensi yang cukup kuat. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur melakukan berbagai kebijakan dan strategi untuk mengurangi kemiskinan yang bergantung pada upaya perempuan untuk meningkatkan nilai tambah di rumah melalui kegiatan ekonomi rumah tangga mengarah pada pengembangan usaha rumahan pada tingkat pemasaran. Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif berbasis rumah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan memperluas pilihan pekerjaan bagi anggota rumah tangga.

Membangun usaha rumahan sebagai landasan strategi penanggulangan kemiskinan menggunakan kebijakan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) untuk pemberdayaan perempuan akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam situasi ini, perempuan memiliki usaha keluarga yang dapat menggunakan tenaga kerja dari keluarga mereka sendiri serta tenaga kerja domestik. Kontribusi perempuan terhadap ekonomi keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, mempekerjakan dan mengembangkan tenaga kerja lokal, dan mengurangi keinginan perempuan untuk bekerja di kota sebagai pekerja rumah tangga atau secara teratur di kedai, rumah makan, toko dan supermarket.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulagi masalah kemiskinan belum menunjukkan hasil maksimal, angka kemiskinan terus meningkat seiring dengan meningkatnya beban

hidup masyarakat. Dengan demikian, sudah saatnya seluruh elemen bangsa proaktif dalam memikirkan solusi atas realitas tersebut. Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pejabat pemerintah mulai dari legislatif, pengambil kebijakan, petugas operasional di lapangan, media massa dan masyarakat pada umumnya (Fadilah, 2013).

Budaya partiarkhi yang mendorong ketidaksetaraan gender, perempuan tidak disarankan untuk bekerja di sektor formal sehingga yang mendorong perempuan untuk mencari pekerjaan di sektor tidak resmi. Laki-laki lebih kuat (*superior*) daripada perempuan dalam segala bidang kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, dan negara dalam bentuk peradaban manusia yang patriarki. Akibatnya, dari generasi ke generasi, budaya patriarki menciptakan hierarki gender dalam masyarakat melalui ketidaksetaraan dalam perilaku, posisi, dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. (Susanto, 2015). Dengan menggunakan bantuan BPUM sebagai modal usaha ekonomi keluarga, dilakukan upaya untuk meningkatkan lapangan kerja perempuan di sektor yang tidak terorganisir. Akibatnya, pemerintah telah membantu merancang kebijakan nasional yang terutama menargetkan perempuan untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender, yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Pemerintah telah membuat kebijakan yang mendukung upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan, serta bagi kelompok miskin yang terpinggirkan, terutama perempuan, sehingga perempuan dapat menggunakan gagasan pemberdayaan ekonomi untuk menghasilkan lapangan kerja bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Gagasan pemberdayaan ekonomi perempuan pada dasarnya adalah paradigma baru di bidang pembangunan yang lebih menekankan pada karakteristik yang berpusat pada SDM dan peningkatan partisipatif jangka panjang (Susilo, 2010).

Perempuan telah berkontribusi pada pemerataan pembangunan sebagai komponen dari sistem pembangunan berkelanjutan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam inisiatif ekonomi keluarga secara strategis penting dalam upaya untuk meningkatkan standar hidup dan memenuhi hak-hak ekonomi bagi perempuan dengan meningkatkan produksi perempuan dan mengurangi tekanan pada kehidupan keluarga. Akibatnya, dalam situasi di mana ekonomi nasional belum mendukung,

peran perempuan menjadi krusial dalam rangka mendukung ekonomi keluarga, menjadikan perwujudan hak-hak perempuan dibidang ekonomi sebagai salah satu kebutuhan mendasar yang dapat memungkinkan perempuan mencapai kesetaraan gender dan pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, menjadi semakin jelas di mana perempuan berdiri dalam hal ekonomi keluarga dan kesejahteraan ekonomi yang wajar.

Kebijakan peningkatan produktivitas perempuan dalam rangka pengurangan beban hidup keluarga miskin dalam rangka otonomi daerah adalah melakukan fasilitasi dan advokasi kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka pengembangan desa yang dapat mencerminkan suatu upaya untuk melibatkan semua orang dalam masyarakat, terutama perempuan, dalam pembangunan desa dalam rangka menciptakan keamanan sosial-ekonomi bagi keluarga miskin, khususnya bagi perempuan. Melalui strategi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan sekaligus pengentasan kemiskinan di desa. Kemiskinan di pedesaan dengan kemiskinan di perkotaan memiliki hubungan kontinuitas yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Karena banyaknya hubungan pertukaran budaya dan ekonomi antara desa dan kota, kemiskinan perkotaan pada dasarnya tertanam dalam kemiskinan pedesaan. Karena migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, pertumbuhan dan kepadatan penduduk di kota-kota mendorong perkembangan ekonomi dan keragaman budaya (Pajriah & Suryana, 2018).

Dengan memungkinkan perempuan untuk mengambil tenaga kerja lokal dari keluarga mereka sendiri serta karyawan di sekitar rumah, seperti tetangga mereka, kebijakan untuk meningkatkan produktivitas usaha ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam situasi ini, berbagai program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan pada dasarnya dapat dikembangkan melalui upaya industri rumahan yang terus ditingkatkan melalui inovasi teknologi guna meningkatkan nilai tambah baik dari segi kualitas barang yang dihasilkan maupun kemasan dan pemasarannya.

Industri rumah tangga merupakan kegiatan ekonomi rumah tangga yang dilakukan melalui inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka mengatasi kemiskinan. Inisiatif ini dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga,

namun sebenarnya didominasi oleh organisasi perempuan seperti KUBE, UPPKS, UP2K, dan kelompok lainnya. Program Peningkatan Pendapatan Ekonomi Daerah (P3EL) dan Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS) merupakan dua inisiatif pemberdayaan perempuan yang terus dijalankan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan yang telah membantu mengurangi kemiskinan.

PENUTUP

Bantuan BPUM digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur untuk usaha ekonomi menengah digunakan untuk membuka usaha industri rumahan umumnya dilakukan oleh perempuan. Pemberdayaan perempuan di sektor industri rumahan sangat relevan dengan rencana strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), khususnya di bidang pengarus utamaan gender di sektor ekonomi. Potensi perempuan sebagai pelaku usaha ekonomi menengah memiliki peranan penting dalam meningkatkan ekonomi keluarga pada sektor usaha mikro.

Budaya partiarkhi yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender telah menghambat partisipasi perempuan di bidang formal sehingga menggerakkan perempuan untuk mencari pekerjaan dalam bidang informal. Adapun perkembangan ketenagakerjaan dari perempuan di sektor informal adalah dengan strategi memanfaatan bantuan BPUM sebagai modal usaha ekonomi keluarga. Oleh karena itu, peran serta pemerintah dalam pengembangan kebijakan nasional khusus bagi perempuan dalam rangka pemberantasan ketimpangan gender yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat desa.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan Bantuan Produktif Usaha mikro (BPUM) memberikan dasar untuk menciptakan industri rumah tangga dengan tujuan memberdayakan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini perempuan melakukan usaha ekonomi keluarga yang dapat menggunakan tenaga kerja dari keluarga mereka sendiri serta tenaga kerja domestik. Usaha ekonomi keluarga yang dilakukan oleh perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, menyerap dan mengembangkan tenaga kerja lokal, dan

mengurangi keinginan perempuan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan pekerja lepas harian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkandito, G. F., Maryani, E., Rahmawan, D., & Wirakusumah, T. K. (2016). Komunikasi Verbal Pada Anggota Keluarga Yang Memiliki Anak Indigo. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 1(1), 46. <https://doi.org/10.24198/jmk.v1i1.9955>
- Aswiyati, I. (2016). Peran wanita dalam menunjang perekonomian rumah tangga keluarga petani tradisional untuk penanggulangan kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. *Jurnal Holistik*, 10(17), 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/11188>
- Fadilah, I. F. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Policy Strategy of Tackling Poverty in Indonesia). *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 12(1), 4.
- Hasanah, S. (2013). Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan). *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 76.
- Hastuti. (2014). Peran Perempuan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Wisata Gabugan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 152. <https://doi.org/10.21831/socia.v11i2.5300>
- Joesyiana, K. (2017). Strategi Pengembangan Industri Rumah Tangga di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Usaha Tas Rajut Industri Pengolahan Kreatifitas Tali Kur). *Jurnal Valuta*, 3(1), 163.
- Jusmita, & Frinaldi, A. (2021). *MENJADI VIRGIN COCONUT OIL DI NAGARI SUNUR, KECAMATAN*. 5, 142.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagement*, 1(2), 89. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Pajriah, S., & Suryana, A. (2018). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan Di Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak: History and Education*, 5(2), 84. <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v5i2.1939> <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/1939>
- Pieters, J., & Klasen, S. (2020). Randomization for women's economic empowerment? Lessons and limitations of randomized experiments. *World Development*, 127(1), 104820. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104820>
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 72. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Samsidar. (2019). Peran ganda wanita dalam rumah tangga. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 12(2), 656.
- Susanto, N. H. (2015). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Muwazah*, 7(2), 122.

- Susilo, B. (2010). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tani Berbasis Kelembagaan. *Jurnal Muwazah, Vol 2, No 2: Desember 2010*, 292. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/330>
- Wanto, A. H. (2017). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 41–42. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>
- Yuwono, D. M. (2013). Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pertanian : kasus pada pelaksanaan program. *Sepa*, 10(1), 142. <https://jurnal.uns.ac.id/sepa/article/view/14122>